

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini membahas wacana endorsement politik melalui konten TikTok bertajuk “titip” Jokowi dalam konteks Pilkada 2024. Dengan menggunakan pendekatan analisis wacana digital Rodney H. Jones, penelitian menganalisis struktur teks, konteks sosial-politik, respons publik, serta ideologi dan kekuasaan yang beroperasi di balik narasi tersebut.

Dari aspek tekstual, konten “titip” disusun dengan narasi simbolik yang kuat. Penggunaan nama calon, penggalan pesan pembangunan dari Jokowi, dan respons calon dalam bentuk kesanggupan menciptakan struktur yang menggiring persepsi bahwa calon tersebut telah mendapatkan restu dari figur nasional yang memiliki legitimasi tinggi. Visualisasi dan gaya penyampaian khas TikTok memperkuat daya tarik dan daya sebar narasi ini. Menariknya, dari konten-konten yang dianalisis, ditemukan adanya pola naratif yang konsisten dan berulang: pembukaan dengan wajah Jokowi, penyebutan nama calon, penyampaian “titipan”, dan penegasan dukungan atau “kesanggupan” dari calon. Kesamaan ini membentuk sebuah *templat* atau pola baku dalam komunikasi politik digital yang mempermudah proses duplikasi oleh calon lain. Dengan adanya *templat* ini, pesan politik menjadi lebih mudah dikenali, namun di sisi lain justru mengaburkan keaslian dan substansi dari masing-masing kandidat.

Secara kontekstual, narasi “titip” menjadi signifikan karena muncul dalam situasi ketika Jokowi telah selesai menjabat sebagai presiden, tetapi pengaruhnya

masih terasa kuat di ranah politik. Popularitas dan citra keberhasilannya dalam pembangunan telah membentuk brand politik yang terus digunakan oleh para calon kepala daerah. Di sisi lain, sebagian besar calon yang menggunakan strategi ini berasal dari partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Hal ini menunjukkan adanya konsentrasi kekuatan politik pada satu poros dominan, sehingga pilihan publik menjadi terbatas dan cenderung diarahkan.

Dalam aspek tindakan dan interaksi, konten “titip” memicu respons yang beragam dari publik. Muncul gelombang resistensi digital berupa komentar bernada sinis, protes, hingga bentuk perlawanan simbolik melalui parodi dan konten tandingan. Situasi ini menciptakan *chaos* digital yang memperlihatkan adanya ketidakpuasan publik terhadap strategi yang dianggap tidak etis atau manipulatif. Namun demikian, meskipun gelombang penolakan terlihat masif di media sosial, sebagian besar calon yang dikaitkan dengan narasi “titip” tetap memenangkan kontestasi. Fakta ini menunjukkan bahwa ekspresi digital tidak selalu mampu mengintervensi atau memengaruhi hasil akhir politik secara nyata.

Dari aspek ideologi dan kekuasaan, konten “titip” memperlihatkan bagaimana kekuasaan dikonstruksi melalui simbolisasi figur Jokowi. Calon kepala daerah lebih menonjolkan kedekatan simbolik dengan Jokowi ketimbang menyampaikan kapasitas personal atau gagasan politik. Pengaruh Jokowi tetap dominan meskipun ia tidak lagi menjabat, karena brand politiknya telah tertanam dalam imajinasi publik. TikTok yang semestinya menjadi ruang ekspresi netral justru digunakan sebagai saluran dominasi simbolik yang memperkuat narasi elite, sementara komentar dan respons kritis dari masyarakat kerap tenggelam dalam arus konten

viral. Praktik endorsement ini pun perlahan menjadi hal yang diterima sebagai kewajaran. Masyarakat terbiasa dengan dukungan dari elite, dan mereka yang mengkritisnya dianggap sebagai kelompok yang menyimpang dari arus utama.

Dalam kerangka Foucault, hal ini mencerminkan kerja kekuasaan yang tidak represif, tetapi berjalan melalui pembiasaan dan pembentukan persepsi yang berulang. Konten “titip” tidak sekadar menjadi alat komunikasi politik, melainkan menjadi bagian dari proses dominasi simbolik yang diterima sebagai kebenaran baru. Wacana tersebut pada akhirnya membatasi ruang kritis, mengaburkan batas antara etika dan kepentingan politik, serta mempersempit makna demokrasi sebagai ruang pertarungan ide yang terbuka. Dalam konteks ini, Pilkada bukan lagi soal siapa yang paling mampu memimpin, tetapi siapa yang paling berhasil mengaitkan diri pada kekuasaan yang telah ada.

5.2 Saran

Penelitian ini menguraikan bagaimana wacana *political endorsement* yang disalurkan melalui *platform* digital, khususnya TikTok, memiliki kekuatan signifikan dalam membentuk 'realitas' politik, mengarahkan persepsi publik, dan bahkan memengaruhi preferensi pemilih dalam konteks Pilkada 2024. Oleh karena itu, bagi audiens, terutama generasi muda dan Gen Z yang merupakan pengguna aktif dan dominan di ekosistem media sosial, menjadi krusial untuk tidak hanya menjadi konsumen pasif informasi, melainkan senantiasa mengembangkan kecermatan dan daya kritis dalam menyaring serta memahami setiap konten yang bermuatan politik. Penting untuk tidak hanya terpaku pada permukaan pesan yang

disajikan – baik itu narasi verbal, visual, maupun elemen non-verbal lainnya – melainkan berupaya untuk menggali makna simbolik yang tersembunyi, memahami konteks di balik produksi konten tersebut, dan mengidentifikasi potensi agenda ideologis serta relasi kekuasaan yang mungkin beroperasi di baliknya.

Meningkatkan literasi *digital* dan kemampuan berpikir kritis adalah kunci utama. Ini berarti tidak mudah terpengaruh oleh 'rezim kebenaran' yang dibangun oleh wacana tertentu, serta mampu menelaah validitas informasi, mengenali bias, dan mempertimbangkan berbagai perspektif yang mungkin berbeda atau bahkan kontradiktif dengan narasi yang dominan. Dengan demikian, audiens dapat terhindar dari manipulasi informasi dan menjadi pemilih yang lebih cerdas dan mandiri. Keputusan politik yang diambil akan didasarkan pada pemahaman yang komprehensif dan rasional, bukan sekadar mengikuti arus *endorsement* dari tokoh sentral atau terperangkap dalam kampanye yang hegemonik. Pada akhirnya, partisipasi aktif dan kritis dari generasi muda akan menjadi fondasi penting bagi terwujudnya demokrasi yang lebih substansial dan akuntabel di masa depan